

WEEK 11: SUPERVISING ISLAMIC BANK

SLIDE 1

Menjadi Pengawas Bank Syariah Supervisory Review Process Berdasarkan IFSB-16

Materi ini tidak hanya menjelaskan teori pengawasan, tetapi melatih mahasiswa berpikir dan bekerja sebagai pengawas bank syariah.

Fokus utama:

1. Apa yang harus diawasi.
 2. Mengapa area tersebut penting.
 3. Data apa yang harus diminta.
 4. Bagaimana cara menganalisisnya.
 5. Apa red flag yang harus dicari.
 6. Apa tindakan pengawasan yang dapat diberikan.
-

SLIDE 2

Mengapa Bank Syariah Perlu Diawasi Secara Khusus

Bank syariah tidak cukup diawasi dengan pendekatan bank konvensional biasa.

Perbedaannya terletak pada:

1. Struktur akad yang berbeda.
2. Risiko dapat berubah pada setiap tahap akad.
3. Ada risiko kepatuhan syariah.
4. Ada investment account holders yang menanggung risiko investasi.
5. Ada displaced commercial risk ketika bank menanggung risiko yang seharusnya ditanggung investor.
6. Instrumen likuiditas syariah lebih terbatas.
7. Reputasi syariah sangat menentukan kepercayaan publik.

IFSB-16 menegaskan bahwa supervisory review untuk IIFS harus mencakup capital, ICAAP, risk management, corporate and sharia governance, securitisation, concentration risk, rate of return risk, stress testing, Islamic windows, consolidated supervision, transparency, dan market discipline.

SLIDE 3

Mindset Utama Pengawas Bank Syariah

Pengawas bank syariah tidak boleh hanya bertanya:

“Apakah bank sudah memenuhi aturan?”

Pengawas harus bertanya:

1. Apakah bank memahami risiko dari model bisnisnya?
 2. Apakah risiko bank sudah tercermin dalam modal?
 3. Apakah risiko setiap akad sudah dikelola sesuai karakteristiknya?
 4. Apakah DPS dan fungsi sharia compliance benar-benar bekerja?
 5. Apakah dana investment account holders diperlakukan dengan benar?
 6. Apakah bank mampu bertahan jika terjadi tekanan likuiditas?
 7. Apakah ada risiko yang belum terlihat dalam laporan keuangan?
 8. Apakah perlu tindakan korektif sebelum masalah menjadi krisis?
-

SLIDE 4

Alur Kerja Pengawas Bank Syariah

Tahap	Tujuan	Output
Memahami model bisnis	Mengetahui sumber risiko utama	Risk map awal
Menganalisis laporan off-site	Mendeteksi tren dan anomali	Early warning
Menilai governance	Menilai kualitas pengambilan keputusan	Governance assessment
Menguji risiko akad	Memastikan risiko syariah dan bisnis terkendali	Transaction findings
Menilai capital dan ICAAP	Menilai kecukupan modal	Capital adequacy view
Menilai likuiditas	Menilai kemampuan bertahan dari penarikan dana	Liquidity risk assessment
Melakukan on-site examination	Memvalidasi data dan praktik	Supervisory finding
Menentukan tindakan	Memaksa perbaikan	Corrective action

SLIDE 5

Case Bank:

Nama bank: Bank Syariah Amanah

Jenis bank: Bank umum syariah

Total aset: Rp50 triliun

Total pembiayaan: Rp35 triliun

Dana pihak ketiga: Rp40 triliun

Modal inti: Rp5 triliun

CAR: 14,2 persen

NPF gross: 4,5 persen

NPF net: 2,8 persen

ROA: 1,2 persen

BOPO: 86 persen

FDR: 87,5 persen

Komposisi pembiayaan:

1. Properti: Rp14 triliun atau 40 persen.
2. Konsumer: Rp10,5 triliun atau 30 persen.
3. UMKM: Rp7 triliun atau 20 persen.
4. Komersial lain: Rp3,5 triliun atau 10 persen.

Komposisi akad:

1. Murabahah: 55 persen.
2. Ijarah muntahiyah bittamlik: 15 persen.
3. Musyarakah: 20 persen.
4. Mudharabah: 5 persen.
5. Istishna dan lainnya: 5 persen.

Struktur pendanaan:

1. Deposito mudharabah: Rp28 triliun.
 2. Giro wadiah: Rp5 triliun.
 3. Tabungan wadiah/mudharabah: Rp7 triliun.
 4. Top 10 depositan: Rp12 triliun atau 30 persen dari DPK.
 5. Top 1 depositan: Rp3 triliun atau 7,5 persen dari DPK.
-

SLIDE 6

Bagaimana Mahasiswa Harus Membaca Case Bank

Pengawas tidak membaca angka secara terpisah.

Pengawas harus menghubungkan angka:

1. Aset Rp50 triliun menunjukkan ukuran bank.
2. Pembiayaan Rp35 triliun menunjukkan risk-taking utama.
3. Properti 40 persen menunjukkan concentration risk.
4. Murabahah 55 persen menunjukkan dominasi akad jual beli.
5. Musyarakah 20 persen menunjukkan potensi equity investment risk.
6. NPF gross 4,5 persen menunjukkan tekanan kualitas aset.
7. CAR 14,2 persen terlihat aman, tetapi harus diuji dengan stress scenario.
8. Top 10 deposit 30 persen menunjukkan funding concentration.
9. FDR 87,5 persen menunjukkan dana cukup banyak tersalurkan ke pembiayaan.
10. BOPO 86 persen menunjukkan efisiensi operasional tidak terlalu kuat.

Kesimpulan awal pengawas:

Bank terlihat masih berjalan normal, tetapi memiliki risiko meningkat pada tiga area: pembiayaan properti, kualitas aset, dan konsentrasi dana besar.

SLIDE 7

Area 1: Pengawasan Model Bisnis

Apa yang harus diawasi:

1. Strategi pertumbuhan bank.
2. Sektor pembiayaan utama.
3. Jenis akad dominan.
4. Sumber pendapatan utama.
5. Sumber dana utama.
6. Kesesuaian model bisnis dengan kapasitas risk management.
7. Kesesuaian ekspansi bisnis dengan modal.
8. Kesesuaian model bisnis dengan kompetensi SDM.

Mengapa penting:

Model bisnis menentukan risk profile bank. Bank yang dominan properti akan memiliki risiko berbeda dari bank yang dominan pembiayaan retail. Bank yang dominan mudharabah dan

musyarakah memiliki risiko monitoring usaha yang lebih tinggi daripada bank yang dominan murabahah.

SLIDE 8

Cara Mengawasi Model Bisnis Secara Praktis

Langkah pengawas:

1. Minta rencana bisnis bank 3 sampai 5 tahun.
2. Minta data pertumbuhan pembiayaan per sektor selama 3 tahun.
3. Minta data pertumbuhan pembiayaan per akad selama 3 tahun.
4. Minta data profitabilitas per segmen.
5. Minta data NPF per sektor dan per akad.
6. Bandingkan pertumbuhan pembiayaan dengan pertumbuhan modal.
7. Bandingkan target bisnis dengan kapasitas SDM, IT, risk management, dan sharia compliance.
8. Tentukan apakah strategi bank konservatif, moderat, atau agresif.

Contoh analisis:

Tahun lalu pembiayaan properti Rp10 triliun. Tahun ini Rp14 triliun. Pertumbuhan properti 40 persen.

Jika total pembiayaan hanya tumbuh dari Rp30 triliun ke Rp35 triliun, maka pertumbuhan total hanya 16,7 persen. Artinya, properti tumbuh jauh lebih cepat daripada portofolio keseluruhan.

Kesimpulan pengawas:

Bank sedang mendorong pertumbuhan melalui sektor properti. Pengawas harus meningkatkan perhatian pada konsentrasi risiko, kualitas agunan, repayment capacity, dan maturity mismatch.

SLIDE 9

Red Flag Model Bisnis

Red flag yang harus dicari mahasiswa:

1. Pertumbuhan pembiayaan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan modal.
2. Satu sektor melebihi 30 sampai 40 persen portofolio.
3. Satu akad digunakan secara dominan tanpa risk assessment yang memadai.
4. Target bisnis terlalu tinggi tetapi NPF sudah meningkat.

5. Bisnis baru diluncurkan tanpa kesiapan SOP, IT, SDM, dan sharia review.
6. Pendapatan bank terlalu bergantung pada margin pembiayaan, bukan fee-based income yang sehat.
7. Bank masuk ke sektor berisiko tinggi tanpa pengalaman.
8. Top deposit sangat dominan dalam struktur dana.

Contoh red flag:

Pembiayaan properti naik 40 persen, tetapi risk committee hanya membahas risiko properti satu kali dalam setahun. Ini menunjukkan strategi bisnis dan governance tidak selaras.

SLIDE 10

Area 2: Pengawasan Kecukupan Modal

Apa yang harus diawasi:

1. CAR.
2. CET1 atau modal inti.
3. Tier 1 dan Tier 2.
4. Risk-weighted assets.
5. Capital buffer.
6. Hubungan antara pertumbuhan aset dan modal.
7. Potensi tambahan modal karena risiko tertentu.
8. Kualitas modal, bukan hanya jumlah modal.
9. Kemampuan pemegang saham melakukan capital injection.
10. Dampak stress scenario terhadap modal.

IFSB-16 menekankan bahwa supervisory authority harus memastikan IIFS memenuhi minimum capital requirement dan bahwa modal harus sepadan dengan keseluruhan risk exposure, termasuk on-balance sheet dan off-balance sheet exposure.

SLIDE 11

Cara Mengawasi Modal Secara Praktis

Data yang diminta:

1. Laporan CAR bulanan.
2. Komposisi modal inti dan modal pelengkap.
3. Rincian RWA untuk risiko kredit, pasar, dan operasional.
4. RWA per jenis akad.
5. RWA per sektor.
6. Proyeksi modal 3 tahun.
7. Rencana dividen.
8. Rencana ekspansi pembiayaan.
9. Stress testing capital.
10. Komitmen pemegang saham.

Langkah analisis:

1. Lihat CAR saat ini.
 2. Lihat tren CAR 12 sampai 36 bulan.
 3. Lihat apakah CAR turun saat pembiayaan tumbuh.
 4. Cek apakah RWA mencerminkan risiko sebenarnya.
 5. Uji apakah CAR masih aman jika NPF naik.
 6. Uji apakah CAR masih aman jika nilai agunan turun.
 7. Uji apakah CAR masih aman jika bank harus menyerap DCR.
 8. Simpulkan apakah perlu capital add-on.
-

SLIDE 12

Contoh Analisis Modal

Data Bank Syariah Amanah:

Modal: Rp5 triliun
RWA: Rp35,2 triliun
CAR: 14,2 persen

Simulasi 1: NPF naik dari 4,5 persen menjadi 8 persen.

Tambahan pembiayaan bermasalah:

8 persen x Rp35 triliun = Rp2,8 triliun
4,5 persen x Rp35 triliun = Rp1,575 triliun
Tambahan NPF = Rp1,225 triliun

Jika loss given default setelah recovery agunan 40 persen:

Kerugian tambahan = 40 persen x Rp1,225 triliun = Rp490 miliar

Modal baru:

Rp5 triliun - Rp490 miliar = Rp4,51 triliun

CAR baru:

Rp4,51 triliun / Rp35,2 triliun = 12,8 persen

Analisis:

CAR masih di atas minimum, tetapi buffer turun dari 14,2 persen menjadi 12,8 persen. Jika ada shock tambahan dari liquidity pressure atau DCR, modal bisa makin tertekan.

SLIDE 13

Simulasi Modal Lebih Berat

Simulasi 2: NPF naik menjadi 10 persen dan nilai agunan properti turun 25 persen.

Tambahan NPF:

10 persen x Rp35 triliun = Rp3,5 triliun
NPF saat ini = Rp1,575 triliun
Tambahan NPF = Rp1,925 triliun

Jika nilai agunan turun, recovery memburuk. Loss given default naik dari 40 persen menjadi 55 persen.

Kerugian tambahan:

55 persen x Rp1,925 triliun = Rp1,059 triliun

Modal baru:

Rp5 triliun - Rp1,059 triliun = Rp3,941 triliun

CAR baru:

$\text{Rp}3,941 \text{ triliun} / \text{Rp}35,2 \text{ triliun} = 11,2 \text{ persen}$

Kesimpulan pengawas:

CAR masih di atas minimum, tetapi bank menjadi vulnerable. Pengawas dapat meminta capital conservation plan, pembatasan ekspansi properti, dan peningkatan pencadangan.

SLIDE 14

Keputusan Pengawas atas Modal

Jika hasil analisis menunjukkan risiko meningkat, tindakan pengawas dapat berupa:

1. Meminta bank menyusun capital restoration plan.
2. Membatasi pertumbuhan pembiayaan sektor berisiko.
3. Meminta bank menahan dividen.
4. Meminta tambahan pencadangan.
5. Meminta capital injection dari pemegang saham.
6. Mengenakan capital add-on jika risiko belum tercermin dalam CAR.
7. Meningkatkan frekuensi pelaporan CAR.
8. Menetapkan supervisory review meeting berkala dengan direksi.

Contoh keputusan:

Karena pembiayaan properti 40 persen dan NPF meningkat, pengawas meminta bank menurunkan pertumbuhan properti dari 40 persen menjadi maksimal 10 persen tahun berikutnya dan menjaga CAR internal minimal 13 persen.

SLIDE 15

Area 3: Pengawasan ICAAP

Apa yang harus diawasi:

1. Apakah bank memiliki ICAAP yang serius.
2. Apakah ICAAP disetujui board.
3. Apakah ICAAP mencakup semua risiko material.
4. Apakah ICAAP memasukkan risiko syariah.
5. Apakah ICAAP memasukkan risiko DCR.
6. Apakah ICAAP memasukkan liquidity stress.

7. Apakah stress test realistis.
8. Apakah hasil ICAAP digunakan dalam strategi bisnis.
9. Apakah capital planning sesuai dengan risk appetite.
10. Apakah asumsi ICAAP terlalu optimis.

IFSB-16 menegaskan bahwa supervisory authority perlu mengevaluasi capital adequacy dan internal systems bank dalam menentukan kebutuhan regulatory capital dan ICAAP capital.

SLIDE 16

Cara Mengawasi ICAAP Secara Praktis

Langkah pengawas:

1. Baca dokumen ICAAP.
2. Cek apakah board benar-benar membahas ICAAP.
3. Cek risk appetite statement.
4. Bandingkan asumsi ICAAP dengan realisasi historis.
5. Cek apakah skenario stress cukup severe but plausible.
6. Cek apakah ICAAP memasukkan risiko akad.
7. Cek apakah ICAAP memasukkan DCR.
8. Cek apakah ICAAP memasukkan sharia non-compliance risk.
9. Cek apakah hasil ICAAP memengaruhi limit bisnis.
10. Cek apakah ICAAP hanya dokumen formal untuk regulator.

Contoh pertanyaan kepada manajemen:

1. Mengapa target pembiayaan properti tetap tumbuh 25 persen ketika NPF sektor tersebut naik?
 2. Mengapa ICAAP menggunakan asumsi NPF 4 persen padahal NPF aktual sudah 4,5 persen?
 3. Apakah bank menghitung kebutuhan modal tambahan jika PER tidak cukup untuk smoothing return IAH?
 4. Apakah board pernah menolak rencana bisnis karena hasil ICAAP menunjukkan risiko tinggi?
-

SLIDE 17

Contoh Temuan ICAAP

Asumsi ICAAP Bank Syariah Amanah:

1. Pertumbuhan pembiayaan: 18 persen.
2. NPF diasumsikan turun dari 4,5 persen ke 4 persen.
3. ROA naik dari 1,2 persen ke 1,5 persen.
4. Harga properti diasumsikan stabil.
5. Tidak ada skenario deposan besar menarik dana.
6. Tidak ada skenario sharia non-compliance event.
7. Tidak ada perhitungan DCR secara eksplisit.

Analisis pengawas:

Asumsi ini terlalu optimis karena tidak konsisten dengan tren risiko. Bank sedang mengalami peningkatan NPF, konsentrasi properti tinggi, dan pendanaan terkonsentrasi pada deposan besar.

Tindakan pengawas:

1. Meminta revisi ICAAP.
 2. Meminta stress scenario NPF 8 persen dan 10 persen.
 3. Meminta skenario penurunan harga agunan properti 20 sampai 30 persen.
 4. Meminta skenario top 5 deposan menarik 50 persen dana.
 5. Meminta DCR dimasukkan ke capital planning.
 6. Meminta ICAAP dibahas ulang oleh board.
-

SLIDE 18

Area 4: Pengawasan Enterprise Risk Management

Apa yang harus diawasi:

1. Struktur fungsi risk management.
2. Independensi Chief Risk Officer.
3. Risk appetite.
4. Risk limit.
5. Risk identification.
6. Risk measurement.
7. Risk monitoring.
8. Risk reporting.
9. Stress testing.
10. Escalation mechanism.

IFSB-16 menyatakan bahwa pengawas harus menilai robustness policy and procedures, metodologi pengukuran risiko, limit structure, serta kualitas monitoring dan reporting kepada senior management dan board.

SLIDE 19

Cara Mengawasi Risk Management

Langkah pengawas:

1. Minta struktur organisasi risk management.
2. Cek apakah CRO independen dari bisnis.
3. Minta risk appetite statement.
4. Minta risk limit per sektor, akad, debitur, dan grup.
5. Cek pelanggaran limit selama 12 bulan.
6. Minta laporan risk committee.
7. Cek apakah risk report membahas forward-looking risk.
8. Cek apakah stress testing digunakan untuk keputusan.
9. Cek apakah risk management bisa menghentikan transaksi berisiko.
10. Wawancara risk management dan unit bisnis untuk melihat apakah risk culture berjalan.

Contoh angka:

Limit properti internal: 35 persen dari pembiayaan.

Realisasi properti: 40 persen.

Pelanggaran limit: 5 persen atau Rp1,75 triliun.

Analisis:

Jika pelanggaran limit tidak dieskalasi ke board, maka risk governance lemah.

Tindakan:

1. Minta penjelasan pelanggaran limit.
 2. Minta action plan penurunan exposure.
 3. Minta penguatan fungsi CRO.
 4. Minta semua pelanggaran limit dilaporkan bulanan.
-

SLIDE 20

Area 5: Pengawasan Corporate Governance

Apa yang harus diawasi:

1. Peran board dalam risk oversight.
 2. Kualitas risk committee.
 3. Kualitas audit committee.
 4. Peran senior management.
 5. Independensi internal audit.
 6. Follow-up temuan audit.
 7. Related party transactions.
 8. Conflict of interest.
 9. Remunerasi yang mendorong risk-taking.
 10. Board understanding terhadap produk syariah.
-

SLIDE 21

Cara Mengawasi Corporate Governance

Langkah pengawas:

1. Review notulen rapat board selama 12 bulan.
2. Cek berapa kali board membahas NPF, likuiditas, dan risiko syariah.
3. Review notulen risk committee.
4. Cek tindak lanjut temuan audit.
5. Minta daftar related party transactions.
6. Cek apakah pembiayaan kepada grup terafiliasi mendapat perlakuan khusus.
7. Cek apakah KPI bisnis mendorong pembiayaan agresif.
8. Interview komisaris, direksi, CRO, internal audit, dan compliance.
9. Nilai apakah board memahami risiko akad.
10. Nilai apakah board hanya menerima laporan atau benar-benar menantang manajemen.

Contoh temuan:

Board meeting 4 kali setahun.

Risk committee meeting 2 kali setahun.

NPF properti naik dari 3 persen menjadi 6,5 persen.

Tidak ada pembahasan khusus pembiayaan properti dalam notulen.

Analisis:

Board oversight tidak memadai. Risiko material meningkat, tetapi governance tidak merespons secara proporsional.

Tindakan:

1. Meminta board membuat dedicated recovery plan untuk sektor properti.
 2. Meminta risk committee rapat minimal bulanan selama periode pengawasan intensif.
 3. Meminta laporan tindak lanjut kepada pengawas setiap bulan.
-

SLIDE 22

Area 6: Pengawasan Sharia Governance

Apa yang harus diawasi:

1. Kompetensi DPS atau Sharia Supervisory Board.
2. Independensi DPS.
3. Frekuensi rapat DPS.
4. Kualitas opini syariah.
5. Proses approval produk.
6. Sharia compliance function.
7. Sharia review.
8. Sharia audit.
9. Pelaporan sharia non-compliance.
10. Proses cleansing atau purification atas pendapatan non-halal.

IFSB-16 menegaskan bahwa meskipun tanggung jawab utama kepatuhan syariah berada pada manajemen IIFS, supervisory authority harus memastikan bank memiliki internal compliance system, kebijakan, dan prosedur untuk memastikan kepatuhan syariah.

SLIDE 23

Cara Mengawasi Sharia Governance

Langkah pengawas:

1. Minta charter DPS.
2. Minta CV dan rekam jejak DPS.
3. Minta jadwal dan notulen rapat DPS.
4. Minta seluruh opini syariah atas produk.

5. Minta product approval file.
6. Minta laporan sharia review.
7. Minta laporan sharia audit.
8. Minta daftar sharia non-compliance event.
9. Cek tindak lanjut temuan sharia audit.
10. Ambil sampel transaksi untuk diuji kesesuaian akad.

Contoh angka:

Jumlah produk aktif: 25 produk.

Produk yang memiliki opini DPS lengkap: 20 produk.

Produk tanpa dokumentasi opini lengkap: 5 produk.

Persentase kelemahan dokumentasi: 20 persen.

Analisis:

Jika 20 persen produk tidak memiliki dokumentasi opini syariah yang lengkap, maka sharia governance bank tidak memadai.

Tindakan:

1. Minta penghentian sementara produk baru sampai dokumentasi lengkap.
2. Minta review ulang lima produk.
3. Minta sharia audit khusus.
4. Minta laporan remediation dalam 60 hari.

SLIDE 24

Area 7: Pengawasan Risiko Akad Murabahah

Apa yang harus diawasi:

1. Apakah bank benar-benar membeli barang.
 2. Apakah barang menjadi milik bank sebelum dijual ke nasabah.
 3. Apakah harga beli, margin, dan harga jual jelas.
 4. Apakah akad dilakukan setelah barang dimiliki bank.
 5. Apakah ada bukti invoice.
 6. Apakah ada bukti delivery.
 7. Apakah ada wakalah dan penggunaannya benar.
 8. Apakah penalti keterlambatan sesuai ketentuan.
 9. Apakah pendapatan diakui sesuai substansi akad.
 10. Apakah akad tidak berubah menjadi pinjaman berbunga terselubung.
-

SLIDE 25

Cara Mengawasi Murabahah

Contoh transaksi:

Nilai barang: Rp950 juta

Margin bank: Rp150 juta

Harga jual murabahah: Rp1,1 miliar

Tenor: 5 tahun

Angsuran bulanan: Rp18,3 juta

Dokumen yang diminta:

1. Purchase order.
2. Invoice supplier.
3. Bukti pembayaran bank ke supplier.
4. Bukti kepemilikan barang oleh bank.
5. Akad wakalah jika nasabah ditunjuk membeli barang.
6. Akad murabahah.
7. Jadwal angsuran.
8. Bukti serah terima barang.

Cara menguji:

1. Cek tanggal invoice.
2. Cek tanggal bank membayar supplier.
3. Cek tanggal akad murabahah.
4. Cek apakah bank sudah memiliki barang sebelum menjual.
5. Cek apakah nasabah menerima barang yang sama.
6. Cek apakah margin sudah disepakati di awal.
7. Cek apakah penalty tidak menjadi pendapatan bank.

Red flag:

Akad murabahah ditandatangani sebelum bank membeli barang. Ini menunjukkan transaksi berpotensi tidak sesuai syariah.

Tindakan pengawas:

1. Minta bank memperbaiki SOP urutan transaksi.
 2. Minta sharia audit atas sampel murabahah.
 3. Minta cleansing jika ada pendapatan yang tidak sesuai.
 4. Minta pelaporan corrective action.
-

SLIDE 26

Area 8: Pengawasan Risiko Akad Ijarah

Apa yang harus diawasi:

1. Apakah bank memiliki aset ijarah.
2. Apakah manfaat aset disewakan secara sah.
3. Siapa menanggung major maintenance.
4. Siapa menanggung operational maintenance.
5. Apakah ujarah jelas.
6. Apakah risiko aset selama masa sewa dipahami.
7. Apakah ada asuransi atau takaful.
8. Apakah transfer kepemilikan dalam IMBT dilakukan dengan benar.
9. Apakah nilai residual diperhitungkan.
10. Apakah aset benar-benar ada dan dapat digunakan.

Contoh:

Bank membeli alat berat Rp20 miliar.
Disewakan kepada perusahaan konstruksi selama 5 tahun.
Ujah tahunan Rp5 miliar.
Estimasi residual value Rp4 miliar.

Risiko:

Jika alat rusak besar dan bank bertanggung jawab atas major maintenance, maka bank memiliki asset risk. Jika residual value ternyata hanya Rp2 miliar, bank mengalami kerugian Rp2 miliar dari estimasi.

Cara pengawas:

1. Cek bukti kepemilikan aset.
2. Cek kontrak ijarah.
3. Cek klausul maintenance.
4. Cek laporan inspeksi aset.
5. Cek takaful coverage.
6. Cek penilaian residual value.
7. Cek apakah bank memiliki kemampuan memonitor aset.

SLIDE 27

Area 9: Pengawasan Risiko Akad Musyarakah

Apa yang harus diawasi:

1. Modal yang disetor masing-masing pihak.
2. Nisbah bagi hasil.
3. Mekanisme loss sharing.
4. Hak kontrol bank.
5. Governance proyek.
6. Laporan keuangan proyek.
7. Exit mechanism.
8. Valuation.
9. Monitoring penggunaan dana.
10. Potensi moral hazard partner.

Contoh:

Bank masuk musyarakah proyek properti.

Kontribusi bank: Rp100 miliar.

Kontribusi developer: Rp50 miliar.

Nisbah laba: bank 60 persen, developer 40 persen.

Proyeksi laba proyek: Rp40 miliar.

Potensi risiko:

1. Developer melaporkan biaya proyek lebih tinggi.
2. Penjualan unit lebih lambat.
3. Bank sulit exit.
4. Valuasi proyek terlalu optimis.
5. Risiko pasar properti turun.

Cara pengawas:

1. Minta kontrak musyarakah.
2. Minta feasibility study proyek.
3. Minta laporan penggunaan dana.
4. Minta laporan penjualan proyek.
5. Cek apakah bank punya hak veto atau monitoring.
6. Cek apakah ada independent project monitoring.
7. Cek apakah laba dihitung berdasarkan laporan yang audited.
8. Cek apakah bank menanggung rugi sesuai porsi modal, bukan fixed return.

Red flag:

Musyarakah memiliki “expected return fixed” yang diperlakukan seperti margin. Ini menunjukkan substansi akad bisa menyimpang.

SLIDE 28

Area 10: Pengawasan Risiko Akad Mudharabah

Apa yang harus diawasi:

1. Bank sebagai shahibul maal.
2. Nasabah sebagai mudharib.
3. Penggunaan dana sesuai tujuan.
4. Nisbah bagi hasil.
5. Mekanisme pelaporan usaha.
6. Kerugian usaha normal ditanggung pemilik modal.
7. Kerugian akibat kelalaian ditanggung mudharib.
8. Monitoring usaha.
9. Risiko manipulasi laporan.
10. Risiko asymmetric information.

Contoh:

Pembiayaan mudharabah: Rp10 miliar.

Nisbah: bank 65 persen, mudharib 35 persen.

Proyeksi laba tahunan: Rp2 miliar.

Porsi bank: Rp1,3 miliar.

Temuan:

Laba dilaporkan hanya Rp500 juta, tetapi omzet usaha meningkat menurut data rekening.

Analisis pengawas:

Ada indikasi underreporting profit. Bank perlu memiliki mekanisme audit usaha dan akses data yang memadai.

Cara pengawas:

1. Cek laporan usaha nasabah.
 2. Cek mutasi rekening.
 3. Cek laporan pajak jika tersedia.
 4. Cek data penjualan.
 5. Cek apakah bank punya hak audit.
 6. Cek apakah bank punya early warning indicator.
-

SLIDE 29

Area 11: Investment Account Holders

Apa yang harus diawasi:

1. Jenis investment account.
2. Restricted dan unrestricted investment account.
3. Perlakuan risiko IAH.
4. Disclosure kepada IAH.
5. Basis bagi hasil.
6. Profit equalisation reserve.
7. Investment risk reserve.
8. Praktik smoothing.
9. Perlindungan investor.
10. Apakah IAH diperlakukan seperti deposito atau investor.

IFSB-16 menyoroti bahwa supervisory authority perlu memperhatikan investor protection issues karena IIFS mengelola dana investment account holders, khususnya unrestricted IAH.

SLIDE 30

Cara Mengawasi IAH

Data yang diminta:

1. Total dana mudharabah unrestricted.
2. Total dana mudharabah restricted.
3. Formula bagi hasil.
4. Historical rate of return.
5. Return aset yang dibiayai dana IAH.
6. PER.
7. IRR.
8. Kebijakan smoothing.
9. Disclosure produk.
10. Keluhan nasabah terkait return.

Contoh angka:

Dana unrestricted mudharabah: Rp20 triliun.

Return aset aktual: 6 persen.

Return yang dibayarkan kepada IAH: 7,2 persen.

Selisih: 1,2 persen.

Nilai subsidi return: 1,2 persen x Rp20 triliun = Rp240 miliar.

Analisis:

Bank membayar return lebih tinggi daripada return aset. Jika selisih ditutup dari bagian bank, maka terjadi displaced commercial risk.

SLIDE 31

Area 12: Displaced Commercial Risk

Apa yang harus diawasi:

1. Apakah bank menahan profit untuk menjaga return IAH.
2. Apakah bank menggunakan PER untuk smoothing.
3. Apakah bank menggunakan IRR untuk menutup kerugian investasi.
4. Apakah DCR dihitung dalam ICAAP.
5. Apakah DCR tercermin dalam capital planning.
6. Apakah alpha factor digunakan dengan tepat.
7. Apakah ada tekanan kompetisi dengan deposito konvensional.
8. Apakah return IAH terlalu stabil dibanding return aset.
9. Apakah nasabah memahami risiko investasi.
10. Apakah bank secara substansi memberi jaminan return.

Contoh:

Return aset tiga tahun:

Tahun 1: 8 persen
Tahun 2: 5,5 persen
Tahun 3: 4,8 persen

Return IAH tiga tahun:

Tahun 1: 7 persen
Tahun 2: 6,8 persen
Tahun 3: 6,7 persen

Analisis:

Return aset turun tajam, tetapi return IAH hampir stabil. Ini indikasi smoothing. Pengawas harus menelusuri sumber smoothing: PER, IRR, atau pengorbanan profit bank.

Tindakan:

1. Meminta bank menghitung DCR secara eksplisit.

2. Meminta DCR masuk ICAAP.
 3. Meminta disclosure lebih jelas kepada IAH.
 4. Meminta pembatasan smoothing jika melemahkan modal.
 5. Meminta capital add-on jika DCR material.
-

SLIDE 32

Area 13: Pengawasan Likuiditas

Apa yang harus diawasi:

1. Liquidity gap.
2. Maturity mismatch.
3. Stabilitas dana.
4. Konsentrasi depositan.
5. Ketersediaan high-quality liquid assets syariah.
6. Akses pasar uang syariah.
7. Akses sukuk likuid.
8. Contingency funding plan.
9. Liquidity stress testing.
10. ILAAP.

IFSB-16 menekankan perlunya IIFS memiliki liquidity risk management framework yang sound dan comprehensive, termasuk governance, board oversight, kemampuan memproyeksikan cash flow, dan diversifikasi tenor serta sumber pendanaan.

SLIDE 33

Cara Mengawasi Likuiditas

Data yang diminta:

1. Maturity profile aset dan liabilitas.
2. Liquidity gap 7 hari, 30 hari, 90 hari, 1 tahun.
3. Daftar top 20 depositan.
4. Aset likuid syariah.
5. Sukuk yang dapat dijual.
6. Fasilitas interbank syariah.
7. Contingency funding plan.
8. Stress test penarikan dana.
9. Historical withdrawal pattern.
10. Rasio FDR dan tren likuiditas.

Contoh data:

DPK: Rp40 triliun
Top 10 depositan: Rp12 triliun
Aset likuid berkualitas tinggi: Rp6 triliun
Sukuk yang mudah dijual: Rp3 triliun
Kas dan giro BI: Rp3 triliun

Simulasi stress:

Top 5 depositan menarik 50 persen dana.
Total dana top 5: Rp8 triliun.
Penarikan: Rp4 triliun.

Retail depositor menarik 10 persen.
Dana retail: Rp28 triliun.
Penarikan: Rp2,8 triliun.

Total outflow stress: Rp6,8 triliun.
Aset likuid tersedia: Rp6 triliun.
Liquidity shortfall: Rp800 miliar.

Kesimpulan:

Bank tidak sepenuhnya mampu menghadapi stress 30 hari. Pengawas harus meminta liquidity buffer tambahan dan contingency funding plan yang lebih realistis.

SLIDE 34

Supervisory Liquidity Review

IFSB-16 mengaitkan liquidity supervision dengan Supervisory Liquidity Review Process dan Internal Liquidity Adequacy Assessment Process. IFSB-16 juga menekankan LCR untuk ketahanan stress jangka pendek dan NSFR untuk mismatch struktural jangka panjang.

Cara mengajarkan kepada mahasiswa:

1. LCR melihat apakah bank punya aset likuid cukup untuk stress jangka pendek.
2. NSFR melihat apakah pendanaan jangka panjang cukup untuk aset jangka panjang.
3. ILAAP adalah proses internal bank menilai kecukupan likuiditas.
4. Pengawas harus mengevaluasi apakah ILAAP realistis.
5. Jika ILAAP hanya formalitas, pengawas harus meminta perbaikan.

Contoh keputusan:

Karena stress test menunjukkan shortfall Rp800 miliar, pengawas meminta bank menambah aset likuid minimal Rp1,5 triliun agar ada buffer tambahan.

SLIDE 35

Area 14: Pengawasan Concentration Risk

Apa yang harus diawasi:

1. Konsentrasi sektor.
2. Konsentrasi debitur.
3. Konsentrasi grup usaha.
4. Konsentrasi geografis.
5. Konsentrasi akad.
6. Konsentrasi agunan.
7. Konsentrasi sumber dana.
8. Korelasi antar risiko.
9. Limit internal.
10. Pelanggaran limit.

Contoh data:

Pembiayaan properti: Rp14 triliun atau 40 persen.
Top 20 debitur: Rp10 triliun atau 28,6 persen pembiayaan.
Top 5 grup usaha: Rp6 triliun atau 17,1 persen pembiayaan.
Agunan properti: 65 persen dari total agunan.

Analisis:

Bank tidak hanya terkonsentrasi pada sektor properti, tetapi juga agunannya mayoritas properti. Jika harga properti turun, dua hal terjadi bersamaan: NPF naik dan nilai recovery turun.

SLIDE 36

Cara Mengawasi Concentration Risk

Langkah pengawas:

1. Minta laporan exposure per sektor.
2. Minta daftar top obligor.
3. Minta daftar group exposure.
4. Minta data agunan per jenis aset.

5. Minta data pembiayaan per wilayah.
6. Bandingkan dengan limit internal.
7. Cek pelanggaran limit.
8. Lakukan stress test sektoral.
9. Cek apakah board menerima laporan konsentrasi.
10. Tentukan apakah perlu pembatasan ekspansi.

Contoh stress:

Properti turun 25 persen.

NPF sektor properti naik dari 6,5 persen menjadi 12 persen.

Pembiayaan properti Rp14 triliun.

NPF properti baru: Rp1,68 triliun.

NPF properti lama: Rp910 miliar.

Tambahan NPF: Rp770 miliar.

Jika LGD 50 persen:

Potensi kerugian tambahan: Rp385 miliar.

Tindakan pengawas:

1. Batasi pertumbuhan properti.
2. Minta tambahan provisioning.
3. Minta review ulang collateral valuation.
4. Minta sectoral exit plan untuk exposure bermasalah.

SLIDE 37

Area 15: Pengawasan Rate of Return Risk

Apa yang harus diawasi:

1. Perbedaan return aset dan ekspektasi deposit.
2. Dampak benchmark rate terhadap ekspektasi pasar.
3. Kemampuan bank menyesuaikan return.
4. Risiko perpindahan dana ke bank lain.
5. Potensi DCR.
6. Komposisi fixed-return dan profit-sharing assets.
7. Maturity repricing.
8. Sensitivitas margin.
9. Hubungan rate of return risk dengan liquidity risk.
10. Hubungan rate of return risk dengan reputational risk.

Contoh:

Rata-rata return deposito syariah bank: 6,7 persen.

Return deposito pesaing: 7,2 persen.

Selisih: 0,5 persen.

Dana deposito mudharabah: Rp28 triliun.

Jika 15 persen deposan pindah karena return kalah:

Outflow = 15 persen x Rp28 triliun = Rp4,2 triliun.

Analisis:

Rate of return risk dapat berubah menjadi liquidity risk.

Tindakan pengawas:

1. Minta bank menghitung sensitivity outflow.
 2. Minta strategi pricing yang sehat.
 3. Minta bank tidak melakukan smoothing berlebihan.
 4. Minta bank memperbaiki komunikasi risiko kepada IAH.
-

SLIDE 38

Area 16: Pengawasan Stress Testing

Apa yang harus diawasi:

1. Apakah stress testing dilakukan secara rutin.
2. Apakah skenario severe but plausible.
3. Apakah mencakup credit risk.
4. Apakah mencakup liquidity risk.
5. Apakah mencakup market risk.
6. Apakah mencakup rate of return risk.
7. Apakah mencakup DCR.
8. Apakah mencakup sharia non-compliance event.
9. Apakah hasilnya dilaporkan ke board.
10. Apakah hasilnya dipakai untuk keputusan bisnis.

IFSB-16 menyatakan bahwa stress testing adalah key risk management tool dan bagian penting dari supervisory assessment under Pillar 2. Stress testing digunakan untuk melihat respons portofolio terhadap perubahan variabel ekonomi, kualitas aset, funding atau market liquidity exposure, profit, dan kemampuan bank memenuhi capital requirement.

SLIDE 39

Contoh Stress Test Terintegrasi

Skenario:

1. NPF naik dari 4,5 persen ke 9 persen.
2. Harga properti turun 25 persen.
3. Top 5 deposan menarik 50 persen dana.
4. Return aset turun dari 6 persen ke 4,5 persen.
5. Bank tetap membayar return IAH 6,5 persen.
6. Satu produk murabahah besar ditemukan tidak patuh syariah.

Dampak kuantitatif:

Tambahan NPF:

$9 \text{ persen} \times \text{Rp}35 \text{ triliun} = \text{Rp}3,15 \text{ triliun}$

NPF saat ini = Rp1,575 triliun

Tambahan NPF = Rp1,575 triliun

Jika LGD 55 persen:

Kerugian kredit = Rp866 miliar.

Dampak DCR:

Dana IAH Rp20 triliun.

Return aset 4,5 persen.

Return dibayar 6,5 persen.

Selisih 2 persen.

DCR cost = Rp400 miliar.

Total tekanan modal:

$\text{Rp}866 \text{ miliar} + \text{Rp}400 \text{ miliar} = \text{Rp}1,266 \text{ triliun}.$

Modal baru:

$\text{Rp}5 \text{ triliun} - \text{Rp}1,266 \text{ triliun} = \text{Rp}3,734 \text{ triliun}.$

CAR baru:

Rp3,734 triliun / Rp35,2 triliun = 10,6 persen.

Kesimpulan:

Bank masih di atas minimum, tetapi sudah masuk zona supervisory concern karena capital buffer turun tajam dan liquidity shortfall terjadi bersamaan.

SLIDE 40

Area 17: Pengawasan Sharia Non-Compliance Risk

Apa yang harus diawasi:

1. Pelanggaran akad.
2. Produk tanpa approval DPS.
3. Kesalahan urutan transaksi.
4. Pendapatan non-halal.
5. Cleansing mechanism.
6. Sharia audit findings.
7. Reputational impact.
8. Potensi withdrawal.
9. Pelaporan kepada regulator.
10. Perbaikan sistem.

Contoh:

Sampel 50 transaksi murabahah.

Transaksi dengan dokumen kepemilikan tidak lengkap: 8 transaksi.

Nilai total 8 transaksi: Rp120 miliar.

Margin yang sudah diakui: Rp9 miliar.

Analisis:

16 persen sampel memiliki kelemahan dokumentasi kepemilikan. Ini bukan isolated case jika pola terjadi pada cabang atau produk yang sama.

Tindakan:

1. Perluas sampel menjadi 200 transaksi.
2. Minta sharia audit khusus.
3. Minta koreksi pengakuan pendapatan jika perlu.
4. Minta cleansing atas pendapatan yang tidak sesuai.
5. Minta perbaikan SOP dan sistem approval.
6. Minta laporan kepada DPS dan board.

SLIDE 41

Area 18: Pengawasan Reputational Risk

Apa yang harus diawasi:

1. Keluhan nasabah.
2. Isu publik terkait syariah.
3. Media coverage negatif.
4. Fatwa atau opini publik yang mempersoalkan produk.
5. Tingkat withdrawal setelah isu muncul.
6. Respons komunikasi bank.
7. Peran DPS dalam menjelaskan isu.
8. Kecepatan remediasi.
9. Dampak terhadap dana murah.
10. Dampak terhadap franchise value.

Contoh:

Berita viral: produk murabahah bank dianggap tidak syariah.
Dalam 2 minggu:

Deposito turun Rp1,5 triliun.
Tabungan turun Rp500 miliar.
Total outflow: Rp2 triliun.

Analisis:

Sharia non-compliance risk berubah menjadi reputational risk dan kemudian menjadi liquidity risk.

Tindakan:

1. Minta bank menyampaikan klarifikasi yang disetujui DPS.
2. Minta action plan likuiditas.
3. Minta sharia review menyeluruh.
4. Minta komunikasi kepada nasabah.
5. Tingkatkan status pengawasan jika outflow berlanjut.

SLIDE 42

Area 19: Pengawasan Islamic Window

Apa yang harus diawasi:

1. Pemisahan dana syariah dan konvensional.
2. Pemisahan pembukuan.
3. Pemisahan aset.
4. Governance window.
5. Sharia compliance.
6. Transfer pricing.
7. Alokasi biaya.
8. Disclosure kepada nasabah.
9. Potensi commingling.
10. Perlakuan capital.

Contoh:

Unit usaha syariah memiliki dana Rp8 triliun.

Sebagian dana ditempatkan sementara di treasury induk konvensional tanpa dokumentasi akad syariah yang jelas.

Analisis:

Ada risiko commingling dan sharia non-compliance.

Cara mengawasi:

1. Minta ledger syariah terpisah.
2. Cek rekening penempatan antar unit.
3. Cek akad treasury internal.
4. Cek approval DPS.
5. Cek disclosure kepada nasabah.
6. Cek apakah pendapatan dari penempatan sesuai syariah.

Tindakan:

1. Minta ring-fencing dana.
2. Minta pemisahan sistem.
3. Minta perbaikan treasury policy.
4. Minta review DPS.

SLIDE 43

Area 20: Pengawasan Consolidated dan Home-Host Supervision

Apa yang harus diawasi:

1. Anak perusahaan.
2. Cabang luar negeri.
3. SPE.
4. Off-balance sheet exposure.
5. Intra-group transaction.
6. Cross-border exposure.
7. Risiko induk terhadap anak.
8. Risiko anak terhadap induk.
9. Koordinasi home-host supervisor.
10. Supervisory college.

Contoh:

Bank memiliki anak perusahaan pembiayaan syariah dengan aset Rp5 triliun.

NPF anak perusahaan 9 persen.

Bank memberi funding Rp2 triliun kepada anak perusahaan.

Analisis:

Risiko anak perusahaan dapat kembali ke bank induk melalui funding exposure dan reputational support.

Cara pengawas:

1. Minta consolidated financial statement.
2. Minta exposure intra-group.
3. Minta laporan risiko anak perusahaan.
4. Cek apakah capital assessment sudah consolidated.
5. Cek apakah ada implicit support.
6. Koordinasi dengan pengawas sektor terkait jika perlu.

SLIDE 44

Off-Site Supervision: Cara Mahasiswa Melakukan Analisis Awal

Tujuan off-site supervision:

1. Membaca tren.
2. Menemukan anomali.
3. Menentukan prioritas pemeriksaan.
4. Membuat early warning.
5. Menilai apakah perlu on-site examination.

Data off-site yang dianalisis:

1. Laporan keuangan.
2. Laporan CAR.
3. Laporan NPF.
4. Laporan FDR.
5. Laporan liquidity gap.
6. Laporan pembiayaan per sektor.
7. Laporan pembiayaan per akad.
8. Laporan top obligor.
9. Laporan top depositan.
10. Laporan sharia compliance.

IFSB-16 menjelaskan bahwa off-site surveillance digunakan untuk mereview kondisi keuangan bank secara reguler, menindaklanjuti isu yang membutuhkan perhatian, mengidentifikasi risiko yang berkembang, dan menentukan prioritas pekerjaan pengawasan lanjutan.

SLIDE 45

Contoh Off-Site Early Warning Dashboard

Indikator	Tahun Lalu	Saat Ini	Interpretasi
CAR	16,5 persen	14,2 persen	Modal menurun
NPF gross	3,0 persen	4,5 persen	Kualitas aset memburuk
NPF properti	4,0 persen	6,5 persen	Risiko sektor properti meningkat
FDR	82 persen	87,5 persen	Likuiditas makin ketat
Top 10 depositan/DPK	22 persen	30 persen	Funding concentration naik
ROA	1,7 persen	1,2 persen	Profitability melemah
BOPO	80 persen	86 persen	Efisiensi memburuk
PER balance	Rp300 miliar	Rp120 miliar	Buffer smoothing menurun

Kesimpulan off-site:

Bank perlu masuk daftar supervisory watchlist karena ada pelemahan simultan pada modal, kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas.

SLIDE 46

On-Site Examination: Cara Mahasiswa Menyusun Pemeriksaan

Tujuan on-site examination:

1. Memvalidasi data off-site.

2. Menguji apakah kebijakan dijalankan.
3. Menguji transaksi secara langsung.
4. Menilai kualitas governance.
5. Mengidentifikasi root cause masalah.
6. Menentukan corrective action.

IFSB-16 menjelaskan bahwa on-site examination digunakan untuk memverifikasi kebijakan, prosedur dan kontrol, menentukan reliabilitas informasi yang dilaporkan, memperoleh informasi tambahan, dan memantau tindak lanjut supervisory concern.

SLIDE 47

Contoh Scope On-Site Examination

Karena hasil off-site menunjukkan risiko properti dan murabahah meningkat, scope on-site difokuskan pada:

1. Pembiayaan properti.
2. Akad murabahah.
3. Akad musyarakah proyek.
4. Collateral valuation.
5. Sharia compliance.
6. Risk approval process.
7. Monitoring pembiayaan.
8. Related party exposure.
9. Liquidity contingency plan.
10. Board oversight.

Sampel pemeriksaan:

1. 30 transaksi murabahah terbesar.
 2. 20 transaksi properti bermasalah.
 3. 10 transaksi musyarakah proyek.
 4. 10 deposit terbesar.
 5. 5 produk dengan return smoothing terbesar.
-

SLIDE 48

Cara Melakukan Transaction Testing

Langkah transaction testing:

1. Pilih sampel berdasarkan risk-based sampling.
2. Ambil file pembiayaan lengkap.
3. Cocokkan proposal, approval, akad, pencairan, dan monitoring.
4. Cek apakah akad sesuai dengan produk.
5. Cek apakah urutan transaksi sesuai syariah.
6. Cek apakah dokumen underlying asset lengkap.
7. Cek apakah analisis repayment capacity memadai.
8. Cek apakah collateral valuation independen.
9. Cek apakah ada exception approval.
10. Catat semua penyimpangan sebagai finding.

Contoh hasil:

Dari 30 transaksi murabahah:

1. 6 tidak memiliki bukti kepemilikan barang yang memadai.
2. 4 memiliki akad wakalah yang ditandatangani setelah pembelian.
3. 3 memiliki penalty yang dicatat sebagai pendapatan bank.
4. 5 memiliki analisis repayment capacity lemah.

Kesimpulan:

Masalah bukan hanya administratif, tetapi menunjukkan kelemahan sistemik dalam kontrol murabahah.

SLIDE 49

Cara Interview Manajemen

Pertanyaan kepada direksi bisnis:

1. Mengapa properti tumbuh 40 persen?
2. Apakah pertumbuhan ini sesuai risk appetite?
3. Bagaimana bank memastikan developer memiliki cash flow?
4. Mengapa pembiayaan tetap tumbuh saat NPF naik?
5. Apakah ada tekanan target penjualan?

Pertanyaan kepada CRO:

1. Apakah CRO pernah menolak proposal properti besar?
2. Apakah limit properti dilanggar?
3. Bagaimana stress test properti dilakukan?
4. Apakah hasil stress test dilaporkan ke board?
5. Apakah risk management independen dari bisnis?

Pertanyaan kepada DPS:

1. Apakah DPS mereview sampel transaksi?
 2. Apakah DPS mengetahui temuan murabahah?
 3. Apakah DPS menerima laporan sharia audit rutin?
 4. Apakah DPS pernah meminta produk dihentikan?
 5. Bagaimana mekanisme cleansing income?
-

SLIDE 50

Cara Menulis Supervisory Finding

Format finding:

1. Kondisi.
2. Kriteria.
3. Penyebab.
4. Dampak.
5. Rekomendasi.
6. Timeline.
7. Penanggung jawab.

Contoh finding:

Kondisi:

Dalam pemeriksaan terhadap 30 sampel murabahah, ditemukan 6 transaksi senilai Rp180 miliar yang tidak memiliki bukti memadai bahwa bank telah memiliki barang sebelum menjual kepada nasabah.

Kriteria:

Akad murabahah mensyaratkan bank memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. IFSB-16 juga menekankan bahwa pengawas perlu memperhatikan risiko transformasi dalam akad dan memastikan sistem kontrol untuk kepatuhan syariah.

Penyebab:

SOP murabahah tidak mengharuskan verifikasi kepemilikan barang secara sistematis sebelum akad jual beli ditandatangani.

Dampak:

Transaksi berpotensi tidak sesuai syariah, menimbulkan risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko pendapatan non-halal.

Rekomendasi:

Bank harus memperbaiki SOP murabahah, melakukan sharia audit khusus atas portofolio murabahah, melakukan cleansing jika diperlukan, dan melaporkan hasil perbaikan kepada pengawas dalam 60 hari.

SLIDE 51

Supervisory Rating Sederhana untuk Latihan Mahasiswa

Area	Rating 1	Rating 2	Rating 3	Rating 4
Capital	Sangat kuat	Memadai	Rentan	Lemah
Asset quality	Sangat baik	Memadai	Memburuk	Bermasalah
Governance	Kuat	Memadai	Lemah	Tidak efektif
Sharia governance	Kuat	Memadai	Banyak kelemahan	Tidak efektif
Liquidity	Kuat	Memadai	Rentan	Kritis
Risk management	Kuat	Memadai	Lemah	Tidak memadai

Contoh rating Bank Syariah Amanah:

Capital: 2
Asset quality: 3
Governance: 3
Sharia governance: 3
Liquidity: 3
Risk management: 3

Kesimpulan:

Bank masuk kategori elevated supervisory concern dan membutuhkan action plan komprehensif.

SLIDE 52

Tindakan Pengawasan Berdasarkan Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Kondisi	Tindakan Pengawas
Normal	Risiko terkendali	Monitoring rutin
Moderate concern	Tren risiko naik	Supervisory letter dan action plan

Tingkat Risiko	Kondisi	Tindakan Pengawas
Elevated concern	Risiko material dan governance lemah	Pengawasan intensif
High risk	Modal atau likuiditas tertekan	Pembatasan ekspansi dan capital plan
Critical	Risiko mengancam kelangsungan bank	Intervention dan recovery action

Contoh untuk Bank Syariah Amanah:

Karena terdapat kenaikan NPF, konsentrasi properti, liquidity shortfall, DCR, dan kelemahan sharia governance, tindakan yang tepat bukan hanya warning. Pengawas harus meminta action plan terintegrasi dan meningkatkan frekuensi pelaporan.

SLIDE 53

Contoh Supervisory Action Plan

Bank diminta melakukan:

1. Menurunkan pembiayaan properti dari 40 persen menjadi maksimal 35 persen dalam 12 bulan.
2. Menahan ekspansi properti baru sampai NPF properti turun di bawah 5 persen.
3. Menambah aset likuid syariah minimal Rp1,5 triliun dalam 3 bulan.
4. Menjaga CAR internal minimal 13 persen.
5. Melakukan sharia audit khusus atas portofolio murabahah.
6. Merevisi ICAAP dengan stress scenario yang lebih berat.
7. Memasukkan DCR dalam capital planning.
8. Meningkatkan frekuensi risk committee menjadi bulanan.
9. Melaporkan progress action plan kepada pengawas setiap bulan.
10. Memperbaiki disclosure kepada investment account holders.

SLIDE 54

Latihan Kelas: Mahasiswa sebagai Pengawas

Instruksi:

Mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok.

Kelompok 1: Capital dan ICAAP

Kelompok 2: Governance dan sharia governance

Kelompok 3: Risiko akad dan transaction testing

Kelompok 4: Likuiditas dan concentration risk

Kelompok 5: Stress testing dan supervisory action

Setiap kelompok harus menjawab:

1. Apa risiko utama?
 2. Data apa yang diminta?
 3. Analisis angka apa yang dilakukan?
 4. Red flag apa yang ditemukan?
 5. Apa supervisory finding?
 6. Apa corrective action?
-

SLIDE 55

Template Jawaban Mahasiswa

Area pengawasan:

Temuan utama:

Data pendukung:

Analisis angka:

Kriteria atau standar:

Dampak risiko:

Tindakan yang direkomendasikan:

Timeline perbaikan:

Unit yang bertanggung jawab:

Rating risiko:

SLIDE 56

Contoh Jawaban Mahasiswa: Likuiditas

Area pengawasan:

Liquidity risk.

Temuan utama:

Bank memiliki liquidity shortfall Rp800 miliar dalam skenario stress 30 hari.

Data pendukung:

Aset likuid Rp6 triliun.

Outflow stress Rp6,8 triliun.

Analisis:

Bank tidak memiliki buffer cukup untuk menghadapi penarikan dana deposito besar dan retail secara bersamaan.

Dampak:

Bank dapat mengalami tekanan likuiditas dan terpaksa menjual aset dengan harga diskon.

Tindakan:

Bank harus menambah aset likuid minimal Rp1,5 triliun, mengurangi ketergantungan pada deposito besar, dan memperbaiki contingency funding plan dalam 90 hari.

Rating:

Liquidity risk rating 3: rentan.

SLIDE 57

Contoh Jawaban Mahasiswa: Sharia Governance

Area pengawasan:

Sharia governance.

Temuan utama:

Dari 30 sampel murabahah, 6 transaksi tidak memiliki bukti kepemilikan barang yang memadai.

Data pendukung:

Nilai transaksi bermasalah Rp180 miliar.

Persentase sampel bermasalah 20 persen.

Analisis:

Terdapat kelemahan sistemik dalam kontrol akad murabahah.

Dampak:

Risiko sharia non-compliance, reputasi, legal, dan cleansing income.

Tindakan:

Bank harus melakukan sharia audit khusus, memperbaiki SOP, melakukan training unit bisnis, dan melaporkan remediation dalam 60 hari.

Rating:

Sharia governance rating 3: banyak kelemahan.

SLIDE 58

Kesimpulan Utama Sesi

Menjadi pengawas bank syariah berarti mampu menghubungkan:

1. Model bisnis dengan risk profile.
2. Akad dengan jenis risiko.
3. Kualitas aset dengan kebutuhan modal.
4. Investment account holders dengan displaced commercial risk.
5. Sharia governance dengan reputational risk.
6. Likuiditas dengan funding concentration.
7. Stress testing dengan supervisory action.
8. Governance dengan kualitas pengambilan keputusan.
9. Off-site analysis dengan on-site examination.
10. Temuan pengawasan dengan corrective action.

SLIDE 59

Framework Akhir: Cara Berpikir Pengawas Bank Syariah

Pertanyaan akhir yang harus selalu diajukan:

1. Apakah bank tahu risiko yang diambil?
2. Apakah bank punya sistem untuk mengukur risiko tersebut?
3. Apakah bank punya kontrol untuk membatasi risiko?
4. Apakah board memahami risiko tersebut?

5. Apakah DPS memastikan transaksi sesuai syariah?
 6. Apakah modal cukup jika risiko memburuk?
 7. Apakah likuiditas cukup jika dana keluar?
 8. Apakah nasabah diberi informasi yang cukup?
 9. Apakah pengawas perlu meminta tindakan korektif?
 10. Apakah masalah ini bisa mengancam stabilitas bank?
-

SLIDE 60

Penutup

Pengawas bank syariah bukan hanya pemeriksa kepatuhan.

Pengawas bank syariah adalah:

1. Analis risiko.
2. Penilai governance.
3. Penguji kualitas akad.
4. Penjaga perlindungan investment account holders.
5. Penilai kecukupan modal dan likuiditas.
6. Pendeteksi dini krisis.
7. Pengambil tindakan korektif untuk menjaga stabilitas bank syariah.

Inti IFSB-16 adalah membangun pengawasan yang risk-based, forward-looking, proporsional, dan memperhatikan kekhususan bank syariah.